JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015

- **Dasar Hukum Gugatan terhadap Sertifikat Pengujian Mutu Pangan Olahan yang Diterbitkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Melalui Pengadilan**
I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati

ISSN. 2442-9090

DASAR HUKUM GUGATAN TERHADAP SERTIFIKAT PENGUJIAN MUTU PANGAN OLAHAN YANG DITERBITKAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MELALUI PENGADILAN

I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati*

ABSTRAK

Indonesia dalam mengakses pasar dunia telah mengadopsi hasil-hasil standar mutu dari the International Organization for Standardization (ISO) dengan memberlakukan melalui Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurut Pasal 30 PP No. 28/2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan, SNI dapat diberlakukan secara wajib dengan mempertimbangkan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian lingkungan hidup dan/ atau pertimbangan ekonomis dengan memenuhi standar mutu pangan. Apabila tidak ada standar mutu dalam SNI, maka dapat dipergunakan standar mutu pangan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan Ketentuan Umum PP No 28/2004 sertifikat mutu pangan merupakan jaminan kepada masyarakat bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi standar mutu tertentu. Dengan demikian berdasarkan PP tersebut sertifikat pengujian mutu pangan olahan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Balai Besar POM merupakan jaminan yang menyatakan pangan olahan yang diedarkan oleh pelaku usaha sudah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan. Munculnya kasus-kasus pelanggaran jaminan mutu dari produk pangan olahan, seperti kasus susu yang mengandung melamin, menimbulkan permasalahan hukum tentang kekuatan mengikat laporan pengujian mutu tersebut dalam pembuktian pada tuntutan ganti rugi konsumen. Permasalahan bagi konsumen yang dirugikan, bagaimana dasar hukum gugatan terhadap pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat laporan pengujian, apabila dituntut melalui pengadilan. Berdasarkan pada analisis bahan hukum secara deskripsi, interpretasi dan argumentasi, laporan pengujian mutu pangan olahan tersebut merupakan bukti tertulis dalam bentuk akte autentik, karena diterbitkan oleh pejabat umum dalam hal ini Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan. Dasar hukum gugatan konsumen yang dirugikan terhadap tanggung jawab pelaku usaha, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah gugatan tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian. Untuk produk yang cacat dan membahayakan didasarkan pada tanggung jawab mutlak (strict liability).

Kata kunci: gugatan, sertifikat pengujian mutu pangan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

* Penulis adalah Dosen pengajar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar Bali. email: ari_krislaw@yahoo.com.

LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan kesadaran konsumen yang tidak hanya berorientasi pada harga tetapi juga berorientasi pada mutu melahirkan konsep pengendalian mutu dan berkembang menjadi prinsip pemastian mutu. Tuntutan jaminan mutu ini membawa pengaruh dalam pasar dunia untuk membentuk keseragaman standar mutu produk secara internasional, sehingga melahirkan organisasi non pemerintah yang disebut dengan the International Organization for Standardization (ISO).

ISO didirikan pada tahun 1974 berkedudukan di Jenewa (Swiss) yang merupakan suatu badan federasi internasional yang terdiri dari badan-badan standardisasi 90 negara. Hasil utama ISO adalah tersetujuan internasional yang diterbitkan sebagai standar internasional. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mempunyai potensi untuk mengakses pasar dunia tidak terhindar dari tuntutan persyaratan standar mutu. Oleh karena itu untuk kepentingan nasional, Indonesia mengadopsi hasil-hasil standar mutu dari ISO tersebut ke dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). Dilihat dalam Pasal 30 PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (PP No. 28/2004) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut sebagai “UU Pangan”), pelaksanaan SNI ada yang diberlakukan secara wajib dan diberlakukan sukarela.

Pelaksanaan wajib SNI menurut Pasal 30 PP No. 28/2004, dengan pertimbangan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis, seperti air minum dalam kemasan, garam konsumsi beryodium, tepung terigu, pakan terbuat dari udang. Produsen yang wajib SNI dapat membubuhkan tanda SNI (SPPTSNI) pada produk atau kemasannya setelah memperoleh sertifikat. Pada SNI yang bersifat sukarela dapat menggunakan standar mutu SNI. Apabila tidak ada dalam SNI dapat dipergunakan standar mutu WHO, Regional atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Khusus untuk pangan olahan mengikuti standar mutu yang ditetapkan oleh BPOM, yang diuji melalui sertifikasi Balai Besar BPOM/ laboratorium terakreditasi. Hasil pengujian mutu diterbitkan Kepala BPOM dalam bentuk laporan pengujian.

Laporan pengujian ini dilihat dari ketentuan umum angka 25 PP 28/2004, adalah merupakan sertifikat mutu pangan yang merupakan jaminan kepada masyarakat bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi standar mutu pangan yang bersangkutan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 19 UU Pangan, yang dimaksud pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Dengan berdasarkan pada ketentuan UU Pangan dan PP 28/2004, ini dapat dinyatakan secara formal

dan substansial sertifikat pengujian mutu pangan yang berbentuk laporan pengujian memberi jaminan keamanan pangan yang diedarkan. Namun kenyataan di masyarakat, karena tidak adanya antinomi hukum antara kewajiban pelaku usaha dengan hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK, sering muncul kasus-kasus pelanggaran jaminan mutu dari produk pangan olahan yang sudah bersertifikat setelah produk diedarkan, disamping kurangnya pembinaan dan pengawasan Balai Besar POM.

Kasus-kasus tersebut, seperti produk susu merek Cina, sudah mendapatkan persetujuan pendaftaran dari Badan POM meskipun kemudian ditemukan kandungan melamin yang membahayakan kesehatan. Produk tersebut antara lain: oreo, snickers biskuit, quozhen (susu bubuk *full cream*).¹ Kasus-kasus ini merugikan konsumen secara fisik, materiil, bahkan membahayakan jiwa konsumen, sehingga menimbulkan sengketa dan memerlukan penyelesaian.

Terhadap penyelesaian kasus-kasus tersebut, piranti hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut “UU Perlindungan Konsumen”), memberi peluang kepada konsumen yang dirugikan untuk menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang dibentuk pemerintah yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum (Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen).

Khusus dalam hubungan penyelesaian sengketa melalui Peradilan Umum untuk mendapat kepastian dan keadilan perlindungan konsumen serta kelangsungan usaha pelaku usaha diperlukan kajian melalui penelitian hukum normatif mengenai kekuatan mengikat sertifikat pengujian mutu pangan olahan yang berbentuk laporan pengujian dari tuntutan ganti rugi konsumen. Sebaliknya bagi konsumen yang dirugikan untuk mendukung prinsip pembuktian, dasar hukum apa yang tepat dipakai landasan dalam mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha yang telah mempunyai sertifikat pengujian mutu pangan olahan. Untuk mengadakan penelitian ini, digunakan pendekatan melalui fakta, melalui perundang-undangan dan analisis konsep hukum, serta didukung oleh asas dan kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dari bahan-bahan hukum ini kemudian dianalisis dengan teknik deskripsi, interpretasi dan argumentasi untuk memperoleh kesimpulan akhir.

¹ Badan POM, “Keterangan Pers tentang Produk Susu Cina yang Mengandung Melamin No. KH 00.01.5.5333”, <http://www.pom.go.id/>, diakses tanggal 27 September 2008.

KEKUATAN MENGIKAT SERTIFIKAT PENGUJIAN MUTU PANGAN OLAHAN DALAM HUKUM PEMBUKTIAN

Sertifikat secara umum adalah surat tanda atau surat keterangan (pernyataan tertulis) atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti suatu kejadian.² Dilihat dari bidang hukum administrasi negara, sertifikat dimasukkan sebagai salah satu bentuk dari perijinan, yaitu sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintah yang ditujukan kepada seseorang atau suatu pihak untuk dapat dilakukannya suatu kegiatan tertentu yang tanpa adanya bentuk sertifikat tersebut dilarang, dengan maksud menimbulkan akibat hukum tertentu.³ Berdasarkan pengertian sertifikat ini, sertifikat dalam hukum administrasi negara dimasukkan dalam kualifikasi *beschikking* (keputusan pejabat tata usaha negara).⁴

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usahan Negara (selanjutnya disebut “UU PTUN”) dinyatakan bahwa untuk sebuah keputusan dapat dimasukkan kualifikasi keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya penetapan tertulis
Keputusan ini memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah yang bentuk formatnya.
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PTUN yang dimaksudkan dengan tata usaha negara adalah administrasi yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, sehingga badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang dimaksud adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan kegiatan bersifat eksekutif.
- c. Dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pembuatan atau penerbitan ketetapan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau harus didasarkan pada wewenang pemerintah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Organ pemerintahan dapat memperoleh kewenangan untuk membuat ketetapan tersebut melalui 3 cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

² Tim Penyusun, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 829.

³ Tatiek Djatmiati, 2004, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi Program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, h.16.

⁴ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Gramedia Indonesia, Jakarta, h. 54-57.

d. Bersifat konkret, individual dan final

Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU PTUN, bahwa ketetapan memiliki sifat konkret, individual dan final. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa konkret berarti objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud. Sedangkan individual Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta final berarti sudah definitif sehingga dapat menimbulkan akibat hukum.

e. Menimbulkan akibat hukum

Tindakan hukum yang dilakukan oleh organ pemerintahan dibidang pemerintahan atau administrasi negara. Akibat hukum yang dimaksudkan adalah muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subyek hukum tertentu.

f. Seseorang atau Badan Hukum Perdata

Ketetapan sebagai wujud dari tindakan hukum publik dari organ pemerintahan ditujukan pada subyek hukum yang berupa seseorang atau badan hukum perdata yang memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum.⁵

Keputusan Tata Usaha Negara yang berbentuk sertifikat dan dilakukan oleh organ pemerintah terhadap tindakan yang menimbulkan hak kewajiban terhadap subyek hukum ini, dilihat dari alat pembuktian hukum acara perdata merupakan alat bukti tertulis yang berupa akta autentik sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1868 BW. Menurut pasal tersebut akta autentik adalah suatu akta yang di dalam suatu bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Yang dimaksud dengan pegawai umum antara lain: hakim, notaris, juru sita, polisi, pegawai pencatat perkawinan dan perceraian kantor urusan agama, pegawai kantor catatan sipil dan pegawai-pegawai yang lainnya yang tugasnya diperintahkan dengan undang-undang.⁶

Dilihat dari hukum pembuktian akta outentik, ini merupakan suatu bukti yang sempurna dan mempunyai kekuatan sebagai berikut :

- a. Kekuatan pembuktian lahir (keluar), yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, bahwa surat yang kelihatannya seperti akta diterima atau dianggap seperti akta dan diperlukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti kebalikannya.

⁵ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, h. 151-163.

⁶ Gatot Supramono, 1993, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni Bandung, Bandung, h. 25.

- b. Kekuatan pembuktian formal, yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa oleh penandatanganan akta diterangkan apa yang tercantum di dalam akta.
- c. Kekuatan pembuktian material, yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi.⁷

Kekuatan pembuktian ini ditegaskan pula oleh Subekti, dengan menyatakan akta outentik memiliki 3 pembuktian, yaitu :

- a. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tadi (kekuatan pembuktian formil).
- b. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan disitu telah terjadi (kekuatan pembuktian material atau yang dinamakan kekuatan pembuktian mengikat).
- c. Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga (kekuatan yang ketiga ini dinamakan kekuatan pembuktian keluar).⁸

Berdasarkan uraian dari sertifikat sebagai alat bukti, apakah sertifikat pengujian mutu pangan olahan yang diterbitkan BPOM dalam bentuk laporan pengujian dapat dinyatakan sebagai akta outentik, diperlukan pendekatan dan analisis secara diskriptif, interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan dan pandangan ahli hukum yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat pengujian mutu pangan olahan. Undang-undang tersebut antara lain, UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen serta peraturan pelaksana dari semua undang-undang tersebut. Peraturan-peraturan tersebut semuanya mengacu pada perlindungan kepada masyarakat umum/konsumen terhadap produk pangan olahan yang aman untuk dikonsumsi disamping untuk menunjang daya saing produk dalam negeri terhadap barang-barang impor dan peningkatan ekspor serta efisiensi nasional.

Untuk mewujudkan tujuan ini, pemerintah menetapkan ketentuan Standardisasi Nasional terhadap produk barang dan/atau jasa untuk industri ekonomi dan perdagangan melalui PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (PP No. 102/2000). Peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari UU Kesehatan, UU Pangan, UU Perlindungan Konsumen.

⁷ Teguh Samudra, 1992, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, h. 47-49.

⁸ Subekti, 2003, *Hukum Pembuktian*, Cetakan Keempat Belas, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 9.

Pelaksanaan standarisasi ini diatur lebih lanjut menurut bidangnya dalam peraturan pemerintah tersendiri, seperti standarisasi produk pangan termasuk pangan olahan yang diatur dalam UU Pangan, peraturan pelaksanaannya diatur dalam PP No. 28/2004. Pasal 37 dan 42 PP No. 28/2004 menyebutkan “[u]ntuk macam produk pangan olahan termasuk bahan olahan tertentu baik yang diproduksi dalam negeri maupun dari luar negeri yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan atau diedarkan diwajibkan mempunyai surat persetujuan pendaftaran pangan olahan”. Persetujuan pendaftaran berlaku selama lima tahun selama masih memenuhi ketentuan yang berlaku, persetujuan pendaftaran yang telah lama habis masa berlakunya wajib melakukan pendaftaran ulang. Untuk mendapatkan surat persetujuan pendaftaran ini, disyaratkan adanya sertifikasi jaminan mutu yang dinilai dari proses produksi sesuai dengan standar yang diakui secara formal, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Indonesia.

Penerapan SNI terhadap pangan olahan ini menurut Pasal 30 PP No. 28/2004 dapat bersifat wajib dan sukarela. Pada SNI yang bersifat sukarela, produsen dapat memproduksi sesuai SNI, apabila tidak ada standar mutu dalam SNI, dapat dipergunakan standar mutu pangan yang ditetapkan BPOM. Dari hasil pengujian laboratorium BPOM yang terakreditasi, BPOM menerbitkan laporan pengujian. Laporan ini isinya menyatakan bahwa pangan olahan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.

Berdasarkan pada Keputusan Kepala BPOM No. HK 00/05.12569 tentang Kriteria dan Tata Laksana Produk Pangan dan Kebijakan Teknisnya, sertifikat pengujian pangan ini ditinjau setiap enam bulan, sedangkan untuk sertifikat *of analysis* dari impor pangan ditinjau setiap kali produk pangan diimpor. Kewenangan BPOM dalam menangani persetujuan pendaftaran dan penilaian mutu pangan ini didasarkan pada Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-departemen (Keppres No. 103/2001). Dalam keputusan Presiden tersebut dinyatakan BPOM merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk oleh Presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kewenangan BPOM dalam Keppres No. 103/2001, BPOM mengeluarkan Surat Keputusan No. HK 00/05.2569 tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan, yang isinya menyatakan produk pangan yang telah memenuhi persyaratan untuk diedarkan mendapatkan persetujuan pendaftaran dan diberikan nomor pendaftaran produk pangan. Untuk nomor pendaftaran produk dalam negeri diberi tanda BPOM RI MD dan Nomor pendaftaran pangan produk impor diberikan tanda BPOM RI ML.

Dilihat dari diskripsi dari peraturan-peraturan tentang latar belakang dan proses terbitnya sertifikat pengujian mutu pangan olahan yang berbentuk laporan pengujian, dapat diinterpretasikan bahwa laporan pengujian yang diterbitkan Kepala BPOM selaku Pejabat Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang menimbulkan akibat hukum bahwa pelaku usaha mempunyai hak bukti yang kuat atas mutu sertifikat (laporan pengujian). Hal ini sesuai dengan ketentuan umum dari PP 28/2004 yang menyatakan “[s]ertifikat mutu pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan”.

Dilihat dari penilaian alat bukti Hukum Acara Perdata, sertifikat pangan olahan adalah akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 1868 BW). Kekuatan pembuktian yang mengikat dari sertifikat pangan olahan, yang diterbitkan oleh pejabat umum, dalam hal ini Kepala BPOM, berdasarkan kewenangannya melimpahkan ke Balai Besar POM sebagai unit pelaksana teknis BPOM, mempunyai kekuatan bukti materiil yang menyatakan apa yang diterangkan di dalamnya adalah benar-benar telah terjadi.⁹ Dengan demikian bukti sertifikasi mutu pangan olahan tersebut menunjukkan kredibilitas pangan olahan dari sudut keamanan dan kesehatan. Namun demikian kekuatan mengikat dari sertifikat pengujian mutu pangan olahan yang menguatkan pihak pelaku usaha ini dapat dibatalkan apabila menurut penilaian Hakim pihak konsumen dapat membuktikan ketidakbenaran kekuatan mengikat sertifikat tersebut.

KONSEP TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan istilah yang terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen. Dalam UU Pangan disebut “tanggung jawab industri”. Konsep yang lain adalah temuan dari kajian teori hukum. Tanggung gugat produk merupakan terjemahan dari “*product liability*”, dan dari kamus hukum bahasa Indonesia menerjemahkan bervariasi, seperti tanggung jawab produk atau tanggung jawab produsen.¹⁰

Agnes M. Tohar lebih cenderung memakai istilah *product liability*, karena yang dimaksud di sini adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Ia memberikan istilah “*product*” sebagai barang, baik yang bergerak maupun tidak

⁹ Hari Sasangka, *Op.cit.* h. 54-55.

¹⁰ Agnes M. Toar, “Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Berbagai Negara”, makalah disampaikan pada Penataran Hukum Perikatan II, tanggal 17-29 Juli 1989, h. 1-2.

bergerak. Tanggung jawab di sini dapat diartikan sebagai tanggung jawab dari akibat adanya hubungan kontraktual (perjanjian) atau tanggung jawab menurut undang-undang (dengan prinsip perbuatan melawan hukum).¹¹ Kemudian Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary, product liability* dirumuskan dengan “*refers to the legal liability of manufacturers and sellers to compensate buyers, users, and even bystanders, for damage or injuries suffered because of defects in good purchased.*”¹² Sedangkan dalam *Convention on the Law Applicable to Products Liability (The Hague Convention)* Artikel 3, menyatakan :

This Convention shall apply to the liability of the following persons:

- 1) Manufacturers of a finished product or of a component part;
- 2) Producers of a natural product;
- 3) Suppliers of a product;
- 4) Other persons, including repairers, and warehousemen, in the commercial chain of preparation or distribution of a product.

It shall also apply to the liability of the agents or employees of the persons specified above.¹³

Dengan demikian yang dimaksud dengan *product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*product, manufacture*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut. Bahkan dilihat dari konvensi tentang *product liability* di atas berlakunya konvensi tersebut diperluas terhadap orang/ badan yang terlibat dalam rangkaian komersial tentang persiapan atau penyebaran dari produk, termasuk para pengusaha bengkel dan pergudangan. Demikian juga para agen dan pekerja dari badan-badan usaha di atas.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian tanggung gugat ini, dapat dinyatakan bahwa *product liability* ini merupakan penekanan tanggung jawab perusahaan atau penjual, yang menjual produksinya yang rusak atau cacat, sehingga membahayakan atau mengakibatkan penderitaan pembeli pengguna, atau orang lain yang bukan pembeli. Ciri-ciri yang dapat dikualifikasikan dari pengertian tanggung gugat produk ini, antara lain:¹⁴

a. Sebagai produsen dapat dikualifikasikan :

- 1) Pembuat produk jadi (*finished product*);

¹¹ Agnes M. Toar, *Op.cit.*, h. 1-2.

¹² Henry Campbell Black, 1983, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Minnesota, West Publishing Company, h. 840.

¹³ Erman Rajaguguk, 2000, et.al, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 46-47.

¹⁴ Yohanes Gunawan, 1994, *Product Liability dalam hukum Bisnis Indonesia*, Makalah disampaikan pada Dies Natalis XXXIX Universitas Katolik Parahyangan Bandung, h. 102.

- 2) Penghasil bahan baku;
 - 3) Pembuat suku cadang;
 - 4) Setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu;
 - 5) Importir suatu produk dengan maksud untuk diperjualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan;
 - 6) Pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan;
- b. Yang dapat dikualifikasikan sebagai konsumen adalah konsumen akhir (*end consumer* atau *ultimate consumers*);
- c. Yang dapat dikualifikasikan sebagai produk adalah benda bergerak, sekalipun benda bergerak tersebut telah menjadi komponen/ bagian dari benda bergerak atau benda tetap lain, listrik, dengan pengendalian produk-produk pertanian dan perburuan;
- d. Yang dapat dikualifikasikan sebagai kerugian adalah kerugian pada manusia (*death* atau *personal injury*) dan kerugian pada harta benda, selain dari produk yang bersangkutan;
- e. Produk dikualifikasi sebagai mengandung kerusakan apabila produk itu tidak memenuhi keamanan (*safety*) yang dapat diharapkan oleh seseorang dengan mempertimbangkan semua aspek, antara lain :
- 1) Penampilan produk (*the presentation of the product*)
 - 2) Maksud penggunaan produk (*intended use of the product*)
 - 3) Saat ketika produk ditempatkan di pasaran (*the time when the product was put into circulation*)
- f. Tanggung jawab tersebut sehubungan dengan produk yang cacat/rusak sehingga menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian bagi pihak lain (konsumen), baik kerugian badaniah, kematian atau harta benda.

DASAR GUGATAN KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI DENGAN PELAKU USAHA YANG MEMPUNYAI SERTIFIKAT PENGUJIAN MUTU PANGAN OLAHAN

Dalam menyelesaikan sengketa ganti rugi, Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen

memberikan pilihan kepada konsumen untuk memilih secara sukarela apakah jalur yang ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan dalam hal ini melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun untuk *class action*, *legal standing*, dan gugatan pemerintah harus diajukan melalui peradilan umum. Dengan demikian secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa hanya seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan saja yang dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui BPSK.

Ditinjau dari segi normatif kedua lembaga yang sama-sama menangani sengketa ganti rugi ini mempunyai perbedaan dari segi proses beracara maupun alat-alat bukti yang dipergunakan sehingga mempengaruhi penerapan prinsip pembuktiannya. Oleh karena itu dalam berperkara umumnya, dan khususnya berperkara di pengadilan hal yang penting diketahui bagi konsumen yang dirugikan adalah dasar hukum gugatan yang ditegaskan dalam surat gugatan, apakah pemenuhan gugatan kerugian baik kerugian fisik maupun jiwa cukup melindungi konsumen atau tidak. Untuk sampai pada suatu kesimpulan bahwa ganti rugi dapat dikabulkan dalil gugatan harus terbukti. Oleh karena itu dasar hukum yang ditegaskan dalam surat gugatan sangat berpengaruh terhadap prinsip pembuktiannya.

Dalam perkembangan tentang konsep tanggung jawab pelaku usaha, dari gugatan konsumen yang dirugikan, pelaku usaha dapat digugat berdasarkan:

- a. Pelanggaran jaminan (*wanprestasi*);
- b. Ada unsur kelalaian (*perbuatan melawan hukum*); atau
- c. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*)

Dasar hukum gugatan berdasarkan tanggung jawab pelaku usaha yang berpengaruh terhadap prinsip pembuktian ini telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan *wanprestasi*;
- b. Tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan kesalahan yang dimuat dalam BW;
- c. Tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian sebagaimana dimuat dalam undang-undang pangan dan perlindungan konsumen.
- d. Berdasarkan perkembangan dasar tuntutan ganti rugi dikenal prinsip pembuktian tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang sudah diikuti oleh negara-negara maju, seperti Inggris,

Amerika Serikat, Jepang.

Ad.a. Prinsip pembuktian dalam tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan wanprestasi

Dalam pembuktian adanya wanprestasi, konsumen harus membuktikan beberapa unsur penting dalam suatu perjanjian, yaitu adanya hubungan kontrak, ada itikad baik (*with good faith*), dan pemberitahuan untuk mendapatkan penggantian kepada penjual produk-produk yang cacat. Kesulitan yang mungkin timbul bilamana bukti transaksi tidak dapat dikemukakan.¹⁵ Demikian pula dalam hal kontrak-kontrak konsumen dengan menggunakan klausula baku yang meniadakan tanggung gugat atau tanggung jawab pelaku usaha terhadap cacat produk kiranya akan menemui kesulitan manakal pelaku usaha bersikukuh pada prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu prinsip bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, akan dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mempertahankan klausula baku tersebut. Sedangkan pembuktian dari konsumen agar melakukan upaya yang terbaik dalam menghasilkan dan memasarkan produknya adalah suatu hal yang berat bagi konsumen karena menghasilkan dan memasarkan produk adalah tanggung jawab dari pelaku usaha sedangkan konsumen hanya pihak pemakai produk tersebut.

Ad.b. Prinsip Pembuktian Dalam Tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum Dalam BW

Tanggung gugat perbuatan melawan hukum berkaitan dengan Pasal 1365 BW. Peraturan melawan hukum menurut Pasal 1365 BW adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 1365 BW tersebut, maka perbuatan melawan hukum mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- a. Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum;
- b. Kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut;
- c. Pelaku tersebut bersalah; dan
- d. Norma yang dilanggar mempunyai daya kerja untuk melindungi konsumen dari suatu kerugian.

¹⁵ Sri Handayani, 2009, *Prinsip Tanggung Gugat Produk Makanan dan Minuman serta Pembuktiannya Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Ringkasan Disertasi pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, h. 67.

Pembuktian oleh konsumen dalam tanggung gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum dalam BW mengikuti penerapan pembuktian dalam pasal 1865 BW jo. Pasal 163 HIR. Karena itu konsumen yang menuntut ganti rugi terhadap pelaku usaha dengan berdasarkan perbuatan melawan hukum dalam 1365 BW tersebut secara kumulatif termasuk didalamnya pembuktian atas kesalahan. Syarat kesalahan dalam pasal 1365 BW, syaratnya:

- a. Sifat tercelanya perbuatan (sifat melanggar hukum), pengertian hukum dalam hal ini tidak hanya terbatas pada bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesesuaian;
- b. Pelakunya dapat disesali karena melanggar norma tersebut.

Hal ini berarti apabila tingkah laku yang melanggar hukum itu tidak dapat disesalkan kepada pelaku usaha, maka ia tidak bersalah.¹⁶

Prinsip pembuktian ini membebani konsumen untuk membuktikan empat syarat perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 BW, sehingga pada prinsipnya sangat berat dan sulit bagi konsumen untuk sampai kesimpulan bahwa pelaku usaha telah melakukan kesalahan sehingga terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Ad.c. Prinsip Pembuktian Dalam Tanggung Jawab Produk Pangan Olahan Dalam Undang-undang Pangan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Pangan dan UU Perlindungan Konsumen dalam pembuktian tanggung gugat produk pangan olahan menganut tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian. Dalam undang-undang tentang pangan yang lama (UU No. 7 Tahun 1996) sebagai landasan hukum bagi pengaturan di bidang pangan pada masa itu, prinsip pembalikan beban pembuktian dalam tanggung gugat berdasarkan kesalahan disimpulkan dari Pasal 41, sebagai berikut:

Ayat (1) Badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan dan atau orang perseorangan dalam badan usaha yang diberi tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi pangan tersebut.

Ayat (3) Dalam hal terbukti bahwa pangan olahan yang diedarkan dan dikonsumsi tersebut mengandung bahan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kesehatan manusia atau bahan lain yang dilarang, maka badan usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti segala kerugian yang secara nyata ditimbulkan.

¹⁶ *Ibid*, h. 69.

Ayat (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal badan usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha dapat membuktikan bahwa hal tersebut bukan diakibatkan kesalahan atau kelalaiannya, maka badan usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha tidak wajib mengganti kerugian.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UU No. 7 Tahun 1996 telah menganut prinsip pembuktian berdasarkan kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian. Pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan pangan olahan yang mengandung bahan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kesehatan manusia atau bahan lain yang dilarang, bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang mengkonsumsi. Dalam UU Pangan yang baru, tidak mengatur prinsip pembalikan beban pembuktian dalam tuntutan ganti rugi konsumen.

Adapun dalam UU Perlindungan Konsumen prinsip pembalikan beban pembuktian berdasarkan tanggung jawab kesalahan diatur pada Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22 (tentang beban serta tanggung jawab pelaku usaha termasuk importir), yang harus dibuktikan oleh konsumen dan Pasal 28 (beban pembuktian pada pelaku usaha tentang adanya kesalahan yang disebutkan dalam rangkaian pasal 19).

Ad.d. Prinsip Pembuktian Tanggung Jawab Pelaku Usaha Produk Pangan Olahan di Berbagai Negara Maju

Doktrin terbaru dalam perkembangan dasar hukum gugatan tanggung jawab produk pelaku usaha di negara-negara maju seperti: Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang adalah tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yaitu tanggung jawab produk yang merugikan konsumen adalah merupakan tanggung jawab risiko. Kebijakan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diterapkan di negara-negara maju ini terhadap barang-barang yang cacat dari pabrik, karena klaim atas kerugian korban itu layak ditujukan pada pabrik yang mengendalikan proses pembuatan yang pada umumnya memanfaatkan “iklan” produk dalam pemasaran untuk meningkatkan dan menguasai pangsa pasar. Sedangkan konsumen menghadapi kesulitan dalam memahami proses produksi yang demikian kompleks pada perusahaan besar atau industri. Di samping itu pihak produsen juga dapat mengasuransikan tanggung jawabnya sehingga secara ekonomis produsen tidak mengalami kerugian yang berarti.

Prinsip pembebanan pembuktian dalam *strict liability*, konsumen disyaratkan untuk membuktikan tiga unsur yaitu: 1) fakta cacatnya produk; 2) kerugian; serta 3) hubungan kausal antara cacat dan kerugian. Dengan pembuktian ini pelaku produsen mempunyai risiko untuk memberi ganti rugi. Unsur kesalahan pada pelaku usaha dikesampingkan.¹⁷ Prinsip

¹⁷ *Ibid*, h. 76.

pembuktian *strict liability* jika dikaitkan dengan teori beban pembuktian adalah sesuai dengan teori kepatutan. Karena dengan prinsip *strict liability*, konsumen lebih mudah membuktikan dan pelaku usaha juga demikian. Sehingga kemungkinan akan menang perkara bagi pihak yang satu, harus sama besarnya dengan kemungkinan bagi pihak lawannya.

Prinsip *strict liability* ini secara prinsip sama dengan tanggung gugat risiko. Di Indonesia tanggung gugat risiko ini diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) BW yang menyatakan, majikan akan bertanggung gugat atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum oleh bawahannya yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam tanggung gugat risiko ini, kesalahan yang mencakup sifat melanggar hukumnya perbuatan oleh majikan selaku pelaku usaha diabaikan. Tetapi tidak berarti unsur kesalahan dan pelanggaran hukum oleh bawahan selaku pekerja diabaikan begitu saja tetapi kedua hal ini harus dibuktikan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1367 ayat (3) BW. Bagi konsumen, tanggung gugat risiko berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) BW merupakan dasar gugatan ganti rugi yang masih belum memberikan perlindungan hukum yang memadai karena pembuktian kesalahan dan perbuatan melanggar hukum oleh bawahan adalah tidak mudah. Bawahan selaku pekerja dari pelaku usaha sudah barang tentu adalah mereka yang telah direkrut dan dilatih oleh pelaku usaha untuk memahami tata cara dan proses produksi serta penggunaan teknologi untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Dengan keahliannya yang tidak dimiliki oleh konsumen, maka pelaku usaha mempunyai kemampuan untuk mengelak dari kesalahan dan perbuatan melanggar hukum.¹⁸

Dalam hukum Eropa Kontinental seperti Belanda, Perancis, yang juga memanfaatkan iklan produk dalam pemasaran untuk meningkatkan dan menguasai pangsa pasar, tanggung gugat risiko diterapkan untuk tanggung gugat bagi produk yang cacat. Sedangkan tanggung gugat terhadap risiko iklan produk cacat yang bersifat mengelabui dan merugikan konsumen diterapkan tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian.¹⁹

Berdasarkan beberapa dasar hukum dari gugatan, tanggung jawab pelaku usaha, prinsip pembuktian serta alat-alat bukti yang mendukung, khusus dalam penyelesaian gugatan ganti rugi konsumen terhadap produk pangan olahan yang sudah mempunyai sertifikat pengujian mutu pangan olahan yang diterbitkan oleh BPOM, lebih tepat diterapkan adalah tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen, karena berkaitan dengan masalah pangan dan menyangkut sengketa konsumen. Di

¹⁸ Sri Handayani, *Op.cit.*, h. 72.

¹⁹ Adrian Sutedi, 2006, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 103.

samping itu sertifikat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan formal dan materiil yang tidak memerlukan pembuktian tambahan dari alat bukti lain. Sehingga pelaku usaha dapat dibebaskan dari gugatan ganti rugi. Sebaliknya kalau konsumen memahami dasar tanggung jawab pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen, serta memahami pula pembuktian sebagai proses untuk meyakinkan hakim atas peristiwa sebenarnya yang diajukan, maka konsumen terhadap gugatannya dapat membantah dengan pembuktian. Seperti adanya hubungan kausal antara cacat produk karena perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan dengan didukung oleh bukti akurat seperti keterangan saksi ahli. Berdasarkan penilaian hakim terhadap keberhasilan pembuktian konsumen tersebut, kekuatan sertifikat itu tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi dan pelaku usaha wajib memberi ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan.

Dalam kaitan dengan era perdagangan bebas saat ini, Endang Saefullah berpandangan, bahwa prinsip tanggung gugat mutlak (*strict liability*) yang berkembang saat ini lebih tepat diterapkan dalam persaingan perdagangan bebas. Oleh karena itu para produsen di Indonesia harus lebih berhati-hati menjaga produk-produk yang dihasilkan agar tidak merugikan konsumen. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga perkembangan dunia industri nasional maupun daya saing produk-produk nasional, terutama di luar negeri.²⁰

PENUTUP

Laporan pengujian mutu pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala BPOM adalah hasil sertifikasi laboratorium terakreditasi, yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan. Sehingga kedudukannya sama dengan sertifikat dan merupakan akte autentik yang mempunyai kekuatan mengikat serta alat bukti yang sempurna. Kekuatan mengikat dan laporan pengujian mutu pangan ini dapat dibatalkan, apabila menurut penilaian hakim pihak konsumen dapat membuktikan ketidakbenaran kekuatan mengikat tersebut.

Dasar hukum dalam surat gugatan konsumen yang dirugikan terhadap tanggung jawab pelaku usaha yang mempunyai sertifikat pengujian mutu pangan olahan berpengaruh terhadap prinsip pembuktian. Sehingga dasar hukum gugatan yang sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen tentang perlindungan konsumen adalah gugatan berdasarkan kesalahan dengan prinsip pembalikan beban pembuktian. Untuk produk yang cacat dan membahayakan melalui

²⁰ Endang Saefullah, 2000, "Tanggung Jawab Produsen Terhadap Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Produk Pada Era Pasar Bebas", dalam Husni Syawali (Ed). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, h. 41.

iklan didasarkan pada tuntutan ganti rugi dengan prinsip pembuktian tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Untuk kepastian hukum dari laporan pengujian mutu pangan olahan sebagai sertifikat, maka penamaan dari laporan itu perlu diganti dengan nama sertifikat pengujian mutu pangan, sehingga kekuatan pembuktian lahirnya sebagai akta autentik lebih jelas. Prinsip pembalikan beban pembuktian hendaknya diakomodasi dalam rancangan hukum acara perdata nasional untuk perkara-perkara perdata yang penggugatnya sulit membuktikan penyebab kesalahan dan kerugian yang diderita.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan POM, “Keterangan Pers tentang Produk Susu Cina yang Mengandung Melamin No. KH 00.01.5.5333”, <http://www.pom.go.id/>, diakses tanggal 27 September 2008.
- Black, Henry Campbell, 1983, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing Company, St. Paul Minnesota.
- Gunawan, Yohanes, 1994, *Product Liability dalam Hukum Bisnis Indonesia*, Makalah disampaikan pada Dies Natalis XXXIX Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
- Handayani, Sri, 2009, *Prinsip Tanggung Gugat Produk Makanan dan Minuman serta Pembuktiannya Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Ringkasan Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- HR, Ridwan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Pridjadmoko, Y. Sri, 2009, *Perizinan Problem Daya Upaya Pembenahan*, Gramedia Indonesia, Jakarta.
- Rajagukguk, Erman et al., 2000, *Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Saefulah, Endang, 2000, “Tanggung Jawab Produsen Terhadap Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Produk Pada Era Pasar Bebas”, dalam Husni Syawali (Ed.), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Sasangka, Hari, 2005, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Mandar Maju, Bandung.
- Subekti, R. 2003, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 1993, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Penerbit Alumni, Bandung.

Sutedi, Adrian, 2006, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tim Penyusun, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Toar, Agnes M., 17-29 Juli 1989, *Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara*, Makalah yang disampaikan pada Penataran Hukum Perikatan II, Ujung Pandang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek.

UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.

PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

Keputusan Kepala BPOM No. HK 00/05.1.2569 tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan.